



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

2025



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



<https://bpkad.sumselprov.go.id>



[bpkad_provsumsel](#)



bpkad2.sumselprov@gmail.com



(0711) 5736539

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Realisasi Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp3.185.487.708.028,30 atau 82,02% dari target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Rp3.883.839.186.169,00, dengan Capaian Fisik mencapai 96%.

Rata-rata kinerja indikator tujuan dan sasaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah 99,30%. Adapun capaian target akhir Renstra di Tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target yaitu Kinerja Indeks Pengelolaan Aset mencapai 103,26%, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya juga telah memenuhi target yaitu Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan sebesar 100% dan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) sebesar 94,63%. Walaupun beberapa capaian indikator program ada yang belum optimal, namun tetap menunjang capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Dalam Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan informasi dalam LKjIP tahun sebelumnya seperti pencapaian kinerja sesuai target minimal yang ditetapkan pada Rencana Kerja sebagai tindak lanjut dari target indikator kinerja daerah yang terdapat pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

2. Meningkatkan koordinasi dan terus membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.
3. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
4. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian output kegiatan, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
5. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini perlu digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

Dengan demikian, terhadap hal-hal tersebut di atas, diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang lebih baik dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan/sasaran/indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Palembang, 31 Maret 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang

:

Keuangan
3. Tugas

:

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : - Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dicekualikan. <i>Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).</i>	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat. 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai. Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.	Laporan Keuangan	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
2.	Sasaran : - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	%	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (<i>Pedoman Penyusunan APBD</i>)	Dokumen APBD Perubahan Tahun n Tepat Waktu + Dokumen APBD Induk Tahun n Tepat Waktu x100% 2 Dokumen	Dokumen APBD Tahun n dan Dokumen APBD Tahun n+1	BPKAD Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumseprov.go.id, Pos-el bpkad@sumseprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

Pihak Pertama
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan - Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Sasaran Strategis - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	%	100
		- Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	%	5
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18 (Baik)
	- Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	- Nila Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.305.340.683.868,00	APBD
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.459.000.000,00	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 127.641.223.754,00	APBD

Palembang, 21 Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru


H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun : 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	91 (Nilai AA)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	903,972,000.00	Sakip AA	20%	40%	60%	100%						
				I Perencanaan, dan Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	903,972,000.00	%	36%	68%	82%	100%						
				I Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	903,972,000.00	%	36%	68%	82%	100%						
					Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2027		22 Laporan	8	7	3	4					Kasubag. Perencanaan dan DI	
					Penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2026			-	1	-	-						
					Penyusunan KUA PPAS TA. 2027			-	1	-	-						
					Penyusunan KUA PPAS P TA. 2026			-	1	-	-						
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Ta. 2027			-	1	-	-						
					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Ta. 2026			-	-	1	-						
					Penyusunan DPA Induk 2027			1	-	-	-						
					Penyusunan DPPA Ta. 2026			-	-	1	-						
					Revisi Perkada			-	1	-	-						
					Menyusun Laporan Monitoring BPKAD ta. 2026			-	-	-	1						
					Menyusun Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD)			1	-	-	-						
					Menyusun LKJIP			1	-	-	-						
					Menyusun LKPJ			1	-	-	-						
					Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan			-	-	-	1						
					Membuat Laporan Peta Risiko			1	-	-	-						
					Membuat Laporan SPIP			-	1	-	-						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
					- Membuat Laporan PUG			-	-	-	1						
					- Membuat Laporan IPKD			-	-	-	1						
					- Membuat Laporan RB			1	-	-	-						
					- Membuat Laporan Komisi			-	1	-	-						
					- Membuat Perjanjian Kinerja			1		-	-						
					- Membuat Laporan Renaksi			1	-	-	-						
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5,525,000,000.00	%	20%	40%	70%	100%						
		Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (Budget Execution)	5%		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		%	25.95%									
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur		%	36.60%									
					Persentase Penurunan SILPA		%	2.50%									
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		%	100%									
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	4,070,000,000.00	%	8%	-	60%	100%						
				2 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	372,000,000.00	%	-	-	100%	-					Kasubid. Anggaran II	
					Dokumen KUA dan PPAS		4 Dokumen	-	-	4	-						
					- Penyusunan Rancangan dan Dokumen KUA dan PPAS TA. 2027		Dokumen	-	-	2	-						
					- Penyusunan Rancangan dan Dokumen KUA dan PPAS TA. 2026		Dokumen	-	-	2	-						
				3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	895,000,000.00	%	24%	-	86%	100%					Kasubid. Anggaran III	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
							34 Dokumen	8	-	22	4						
				- Penyusunan Dokumen Raperta dan Perda				4	-	-	4						
				- Penyusunan Rapergub dan Pergub				4	-	-	-						
				- Penyusunan Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Pemandangan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risetlah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026				-	-	22	-						
				4 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.803.000.000,00	%	25%	50%	75%	100%					Kasubag. Perencanaan dan DI	
				- Penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			1 Dokumen	-	-	-	1						
			ii	Koordinasi dan Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	670.000.000,00	%	25%	50%	75%	100%						
				5 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	370.000.000,00	%	25%	50%	75%	100%					Kasubid. Perencanaan I	
				- Penyusunan Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID, TDF)			44 Dokumen	11	11	11	11						
				6 Rekonsiliasi Penerimaan dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Data Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	300.000.000,00	%	25%	50%	75%	100%					Kasubid. Perencanaan III	
				- Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKP)			179 Dokumen	44	45	45	45						
			iii	Koordinasi dan Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	785.000.000,00	%	45%	75%	85%	100%						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan					Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
				7 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	350,000,000.00	%	I 25%	II 50%	III 75%	IV 100%	I	II	III	IV	Kasubbid. Akuntansi I		
				- BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D			17 Dokumen	4	4	4	5							
				8 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	435,000,000.00	14 Dokumen	35%	70%	100%	-					Kasubbid. Akuntansi 3		
					- Penyusunan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi													
					- Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan)													
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	2,18 (Baik)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,459,000,000.00	%	20%	40%	70%	100%						III	
					Persentase Pemambahan Nilai Aset Tetap		%	-	-	-	6%							
					Asset Management		%	-	-	-	100%							

